BAB III

PENATARAN P4 BAGI MAHASISWA SEBAGAI PROGRAM PENDIDIKAN PANCASTLA

Pada bagian ini akan dibahas tentang konteks yang lebih luas dari proses belajar-mengajar penataran P4, yaitu: penataran P4 sebagai program pembudayaan Pancasila, penataran P4 bagi mahasiswa, pendekatan-pendekatan dalam proses belajar-mengajar pendidikan moral, dan temuan-temuan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penataran P4.

1. Penataran P4 sebagai Program Pembudayaan Pancasila

Penataran P4 merupakan salah satu program nasional dalam upaya pembudayaan Pancasila. Lima sasaran
pokok yang hendak dicapai oleh Kabinet Pembangunan V
diantaranya adalah terbudayanya ideologi Pancasila,
demokrasi Pancasila, dan P4 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Program ini merupakan
kelanjutan dan peningkatan dari program-program kabinet
terdahulu, yakni: program Kabinet Pembangunan III yang
mendasarkan programnya pada ketetap neketetapan MPR
tahun 1978, dan program Kabinet Pembangunan IV yang
mendasarkan programnya pada ketetapan-ketetapan MPR tahun 1983.

Pembudayaan Pancasila meliputi upaya yang luas yang tidak hanya menyangkut upaya pendidikan, tetapi juga meliputi upaya penataan kehidupan bernegara seperti diberlakukannya Pancasila sebagai satu-satunya azas bagi Parpol dan Golkar. Pembudayaan Pancasila melalui sektor pendidikan, baik dalam lingkup sektor pendidikan formal, pendidikan nonformal, maupun pendidikan informal seringkali disebut dengan pendidikan Pancasila.

Pendidikan Pancasila dalam lingkup pendidikan formal sudah barang tentu di bawah tanggung jawab Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Tetapi pendidikan Pancasila dalam lingkup pendidikan nonformal, khususnya penataran P4, harus melalui koordinasi Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7).

a. Peranan BP7

BP7 merupakan lembaga pemerintah yang bersifat non-departemental yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung-jawab langsung kepada Presiden. Tugas pokok BP7 adalah melaksanakan pembinaan dan pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan P4 di kalangan masyarakat berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Presiden (pasal 1 dan pasal 2 Kepres RI No.10 tahun 1979).

Sejak didirikan oleh Presiden tahun 1979 BP7 berperanan dalam kegiatan-kegiatan:

- a. Perumusan kebijaksanaan dan program nasional mengenai pendidikan pelaksanaan P4 di kalangan masyarakat dan di lingkungan lembaga-lembaga pemerintah.
- b. Penyelenggaraan pendidikan atau penataran pelaksanaan P4 bagi calon-calon penatar yang diperlukan bagi masyarakat dan lembaga-lembaga pemerintah.
- c. Pembinaan, pengawasan dan pengkoordinasian penyelenggaraan pendidikan atau penataran yang diselenggarakan oleh organisasi masyarakat dan lembaga-lembaga pemerintah.
- d. Dan lain-lain yang ditentukan Presiden (Pasal Kepres RI No.10 tahun 1979).

Program pendidikan pelaksanaan P4 yang diselenggarakan dan dikoordinasikan BP7 meliputi program penataran dengan berbagai pola dan progrem non-penataran.

Program non-penataran meliputi kegiatan simulasi, penggunaan modul, lomba cerdas tangkas, dan pertunjukan-pertunjukan seni budaya tradisional. Menurut laporan Kepala BP7 Pusat Oetojo Oesman, warga negara Indonesia yang telah dikenai program-program tersebut sejumlah 64.990.709 orang sampai tahun 1989. Dan usaha-usaha untuk mengembangkan metode-metode baru dan materi yang lebih tepat bagi pelaksanaan kegiatan pembudayaan P4 terus diusahan oleh BP7 (Mimbar BP7 NO.38 Th.VII-1989, h.8). Dari segi ini dapat dipahami bahwa BP7 memiliki peranan sentral dalam penyelenggaraan penataran P4 di seluruh tanah air.

b. Pola-pola Penataran P4

Walaupun menggunakan pendekatan yang sama, penataran P4 terdiri dari berbagai pola. Pola penataran P4 adalah seperangkat program penataran P4 ang terdiri dari urutan metode sajian dalam jumlah waktu tertentu. Pola-pola penataran P4 itu diadakan mengingat sasaran penataran P4 yang beragam, baik dari segi ting-kat pendidikan maupun kepentingannya.

Penataran P4 terdiri dari dua pola pokok, yaitu: pola calon penatar dan pola pendukung. Panataran P4 pola calon penatar diselenggarakan selama 120 jam dengan urutan metode sajian: ceramah P4, UUD 1945, dan GBHN selama 22 jam; pendalaman materi penataran pertama 7.1/2 jam; diskusi kelompok P4, UUD 1945, dan GBHN selama 24 jam; diskusi kelas P4, UUD 1945, dan GBHN selama 24 jam; berpidato 16 jam; pendalaman materi penataran kedua selama 8 jam; diskusi paripurna P4, UUD 1945, dan GBHN selama 8 jam; dan sajian tentang teknik penyajian materi selama 7 jam (BP7 Pusat, 1985:7-8).

Peserta penataran P4 dengan pola calon penatar adalah pengurus atau kader-kader dari organisasi sosial politik, organisasi profesi dan fungsional, organisasi ke-agamaan/kerokhanian dan organisasi-organisasi masyarakat lainnya, serta lembaga-lembaga pemerintah, yang ditunjuk oleh pimpinan organisasi dan pimpinan lembaga pemerintah yang bersangkutan (BP7 Pusat, 1985:10).

Penataran P4 pola pendukung terdiri dari: pola pendukung 45 jam, pola pendukung 45 jam, dan pola pendukung 17 jam. Peserta penataran P4 pola pendukung dipilih karena kedudukan dan fungsinya di dalam masyarakat berada dalam posisi yang strategis untuk ikut serta, baik langsung maupun tidak langsung, menyebar-luaskan P4 dan memantapkan pelestarian nilai-nilai Pancasila di lingkungan masing-masing. Penataran P4 untuk mahasiswa termasuk penataran P4 pola pendukung 45 jam yang dipadukan dengan pelaksanaan orientasi program studi (Surat Dirjen Dikti No.2636/D/T/90).

Penataran P4 pola pendukung 45 jam terdiri dari kegiatan ceramah P4, UUD 1945, dan GBHN selama 18 jam; pendalaman materi P4, UUD 1945, dan GBHN selama 7 1/2 jam; diskusi kelas P4, UUD 1945, dan GBHN selama 15 jam; dan diskusi paripurna P4, UUD 1945, dan GBHN selama 6 jam.

Penataran P4 pola pendukung 25 jam terdiri dari kegiatan ceramah P4, UUD 1945, dan GBHN selama 13 jam; dan pendalaman materi dan sekaligus diskusi P4, UUD 1945, dan GBHN selama 13 1/2 jam.

Penataran P4 pola pendukung 17 jam terdiri dari kegiatan ceramah P4, UUD 1945, dan GBHN selama 10 jam; dan pendalaman materi sekaligus diskusi P4, UUD 1945, dan GBHN selama 7 1/2 jam (SK Kepala BP7 Pusat No.Kep-08/BP7 / II / 1983).

Peserta penataran P4 pola pendukung 45 jam adalah pengurus dan kader-kader organisasi masyarakat.

Peserta penataran P4 pola pendukung 25 jam adalah para
kader-kader organisasi masyarakat. Dan penataran P4 pola pendukung 17 jam adalah anggota-anggota biasa organisasi masyarakat dan anggota masyarakat lainnya. Penataran
P4 untuk pegawai negeri lebih dikenal dengan istilah
penataran P4 tipe A, tipe B, dan tipe C. Penataran P4
tipe A untuk pegawai negeri golongan IV dan golongan III.
Penataran P4 tipe B untuk pegawai negeri golongan II.
Dan penataran P4 tipe C untuk pegawai negeri golongan I
(pasal 5 Inpres RI No.10 tahun 1978).

c. Kurikulum Penataran P4

Kurikulum penataran P4 menyangkut aspek-aspek tujuan, pendekatan, metode, materi, dan evaluasi yang dipakai dalam pelaksanaan penataran P4 untuk semua pola. Kurikulum penataran P4 yang raku terdapat pada Lampiran Surat Keputusan Kepala BP7 Pusat Nomor 08/BP7/II/1983.

Agaknya kurikulum penataran P4 tersebut merupakan penegasan dari kurikulum penataran P4 yang pertama dipergunakan bulan Oktober 1978.

Tujuan pokok penataran P4 adalah untuk memberikan pengetahuan kepada segenap warga negara Indonesia tentang UUD 1945 dan ketetapan-ketetapan MPR, terutama tentang hatatapan MPR tentang P4 dan GBHN, dengan maksud

agar mereka dapat menghayati dan mengamalkannya dengan lebih baik, serta mampu menyebar-luaskannya di lingkungan masing-masing. Jadi tugas pokok penataran P4 adalah agar rakyat semakin sadar tentang hak dan kewajibannya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasar-kan Pancasila dan UUD 1945 (BP7 Pusat, 1985:5).

Pendekatan yang dipakai untuk mencapai tujuan tersebut adalah pendekatan objektif-praktis. Hal itu berarti nilai-nilai objektif Pancasila, baik dalam kedudukannya sebagai dasar negara maupun pandangan hidup, dijadikan acuan dalam memecahkan masalah-masalah praktis yang muncul. Dalam bahasa yang lebih mudah dimengerti, BP7 mendefinisikan pendekatan objektif-praktis sebagai berikut:

- a. Objektif, dalam arti bahwa materi yang ditatarkan didasarkan atas bahan-bahan resmi dan semua uraian yang selalu dapat dikembalikan secara bulat dan sistematis pada bahan-bahan resmi tersebut.
- b. Praktis, dalam arti bahwa materi yang ditatarkan adalah penting dan berguna bagi kepentingan peningkatan kesadaran politik rakyat dalam rangka usaha mencerdaskan bangsa (BP7 Pusat, 1985:12).

Definisi ini memberikan kepercayaan yang tinggi kepada bahan-bahan resmi untuk dijadikan acuan pokok dalam pengembangan materi penataran P4, maupun untuk menyusun kegiatan belajar-mengajarnya.

Bahan-bahan resmi tersebut terdiri dari bahan pokok, bahan pelengkap, dan bahan referensi. Bahan pokok berupa "Buku Merah Putih" yang berisi Ketetapan MPR nomor

II/MPR/1978 tentang P4, Undang-Undang Dasar 1945, dan ketetapan MPR tentang GBHN. Bahan pelengkap berupa buku yang memuat bahan ceramah mengenai P4, UND 1945, dan GBHN. Dan bahan referensi berisi tentang ketetapan-ketetapan MPR lainnya, pidato-pidato kenegaraan Presiden, dan pidato-pidato Presiden lainnya (BP7 Pusat, 1985:13).

Bahan-bahan resmi penataran P4 disusun oleh tiga tim penyusun yang kemudian diteliti dan disempurnakan oleh sub tim masing-masing. Ketua sub tim Pancasila adalah Daryatmo. Sudharmono mengetuai sub tim UUD 1945. Dan Widjojo Nitisastro mengetuai sub tim GBHN. Akhirnya bahan-bahan resmi penataran P4 tersebut disahkan oleh Ketua Tim Pembinaan Penatar dan Bahan Penataran Pegawai Republik Indonesia yang diketuai M.Panggabean pada tanggal 10 Nopember 1978 (Dirjen Dikti, 1989:247). Personalia tim penyusun bahan penataran P4 ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI No.172/M/1978.

Sesuai dengan pendekatan objektif-praktis yang dipakai dalam penataran P4, maka metode-metode penyajian materi secara berurutan dimulai dari ceramah dan tanya jawab bahan-bahan resmi, pendalaman bahan-bahan resmi tersebut, dan mendiskusikannya. Khusus untuk penataran P4 pola calon penatar ditambah dengan kegiatan berpidato dan ceramah tentang teknik penyajian materi (BP7 Pusat, 1985:11).

Aspek-aspek yang dinilai dalam penataran P4 adalah penguasaan materi penataran, disiplin, aktivitas, kerjasama, dan kemampuan menyatakan pendapat. Penilaian dilakukan oleh penatar berdasarkan hasil pengamatannya terhadap perilaku atau kemampuan petatar yang dipimpinnya dalam berbagai kegiatan belajar yang dilakukan. Alat yang dipergunakannya adalah formulir. Petatar dinilai secara individual dan secara keseluruhan dalam suatu kelas (BP7 Pusat, 1986:200-203).

2. Penataran P4 bagi Mahasiswa

Penataran P4 bagi mahasiswa baru telah dimulai sejak tahun 1983, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No.86/Dikti/Kep/83. Selanjutnya pelaksanaan penataran P4 bagi mahasiswa baru dikoordinasikan BP7 melalui Surat Keputusan Kepala BP7 Pusat No.Kep-01/BP7/I/1984.

Penataran P4 bagi mahasiswa baru termasuk pola pendukung yang diselenggarakan dalam jumlah waktu yang lebih banyak, yakni lebih-kurang 100 jam. Oleh karena itu penataran P4 jenis ini disebut juga dengan Penataran P4 Pola Pendukung 100 Jam.

Pelaksanaan penataran P4 bagi mahasiswa dipadukan dengan pelaksanaan orientasi program studi dan pengenalan kampus. Jadi penataran P4 bagi mahasiswa baru memiliki

dua komponen pokok, yaitu: komponen penataran P4 itu sendiri, dan komponen Opspek (Orientasi Program Studi dan Pengenalan Kampus). Komponen pertama diselenggarakan selama 87 jam, dan komponen kedua diselenggarakan selama 12 1/2 jam. Komponen penataran P4 tersebut setara dengan jumlah jam penataran P4 untuk calon penatar dikurangi acara pidato dan pendalaman kedua, yaitu: ceramah P4,UUD 1945, dan GBHN selama 24 jam; acara pendalaman selama 8 jam; acara diskusi kelompok P4, UUD 1945, dan GBHN selama 24 jam; diskusi kelas F4, UUD 1945, dan GBHN selama 24 jam; dan diskusi paripurna selama 7 jam. (BP7 Pusat, 1985:226).

Pola tersebut berlaku hingga tahun akademik 1939/1990. Mungkin karena adanya isu kejenuhan dalam penataran P4, maka mulai tahun akademik 1990/1991 penataran P4 pola 100 jam tersebut komposisinya dirubah. Komponen penataran P4 yang semula 87 jam dirubah menjadi 45 jam. Dan komponen Opspek yang semula 12 1/2 jam dirubah menjadi 55 jam. Komposisi komponen pertama disesuaikan dengan bentuk baku penataran P4 pola pendukung 45 jam. Sedangkan komposisi komponen kedua merupakan perluasan dari komposisi sebelumnya (Surat Dirjen Dirjen Dikti No.2636/D/T/90). Perubahan ini dianggap sebagai upaya peningkatan penataran P4 pola 100 jam bagi mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri.

Penataran P4 pola pendukung 100 jam bagi mahasiswa baru semula dimaksudkan untuk mengganti MKDU Pendidikan Pancasila yang berbobot 2 sks (pasal 1 Surat Keputusan Dirjen Dikti No.86/Dikti/Kep/1983). Tetapi beberapa perguruan tinggi yang telah melaksanakan MKDU Pendidikan Pancasila secara baik keberatan dengan penggantian itu dengan alasan MKDU Pendidikan Pancasila telah berjalan baik, dan sekalipun jumlah jam penataran P4 sama dengan jumlah jam MKDU Pendidikan Pancasila dalam satu semester namun pemberian dalam jangka waktu dua minggu dalam penataran P4 dianggap kurang membekas pada mahasiswa (BP7 Pusat, 1985:225). Sehingga Direktur Jendral Pendidikan Tinggi mengirim surat kepada Rektor perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia pada tahun 1984 yang menyatakan bahwa penggantian tersebut 'tidak harus' (Surat Dirjen Dikti No.1008/D/Q/1984).

a. Kaitan Penataran P4 dengan MKDU Pendidikan Pancasila

Penataran P4 bagi mahasiswa baru perlu diperbanding-kan dengan MKDU Pendidikan Pancasila, baik dari segi tujuan, maupun dari segi materi, dan metodenya. Sehingga keduanya bisa dilihat secara proporsional bila perguruan tinggi bermaksud hendak mengganti MKDU Pendidikan Pancasila dengan penataran P4 pola 100 jam.

Dari segi tujuan akhir yang hendak dicapai, tidak ada perbedaan antara penataran P4 dengan MKDU Pendidikan Pancasila. Keduanya sama-sama hendak menciptakan mahasiswa yang memahami Pancasila secara baik dan benar, serta mampu menghayati dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan MKDU Pendidikan Pancasila secara eksplisit menyatakan:

Berjiwa Pancasila sehingga segala keputusan serta tindakannya mencerminkan pengamalan nilai-nilai Pancasila dan memiliki integritas kepribadian yang tinggi mendahulukan kepentingan nasional dan kemanusiaan sebagai sarjana Indonesia (Dirjen Dikti, 1983:viii).

Tanpa mengetahui ruang lingkup dan kedalaman materi masing-masing, yang jelas jenis materi keduanya sama, yaitu: P4, UUD 1945, dan GBHN. Hal itu berlaku pula bagi PMP (Pendidikan Moral Pancasila) dari Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (Tim Pendidikan Moral Pancasila, 1983:10-11). Perbedaannya, penataran P4 berpegang teguh pada materi resmi, sedangkan MKDU Pendidikan Pancasila masih terdapat kelaluasaan bagi dosen untuk mengembangkannya sendiri berdasarkan literatur-literatur lainnya. Walaupun begitu, akhirnya dosen dalam mengembangkan materi Pendidikan Pancasila tetap bermuara pada nilai-nilai ohjektif Pancasila.

Diduga ada perbedaan yang besar antara penataran P4 dan MKDU Pendidikan Pancasila dalam hal-hal yang bersifat metodologis, karena dua faktor, yaitu: faktor

otonomi dan faktor waktu. Metodologi penataran P4 sudah dipolakan dan bersifat baku. Perubahan-perubahan terhadap pola-pola tersebut hanya mungkin lewat persetujuan BP7. Dalam penataran P4 si penatar tidak memiliki otonomi untuk menggunakan metode-metode lain yang menurut keyakinannya efektif untuk mencapai tujuan penataran. Hal ini berkaitan dengan pasal 8 Surat Keputusan Kepala BP7 Pusat Nomor Kep-O1/BP7/I/1984 sebagai berikut:

Pembinaan, pengawasan dan pengkoordinasian penyelenggaraan penataran bagi mahasiswa baru universitas/akademi/institut, dilakukan oleh BP7 daerah setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (BP7 Pusat, 1985:19).

Otonomi yang besar dimiliki dosen dalam mengguna-kan metode-metode mengajar yang menurut pertimbangannya efektif untuk mencapai tujuan Pendidikan Pancasila. Keputusan untuk memilih metode-metode yang akan digunakan tidak perlu mendapat persetujuan siapapun. Fleksibilitas metodologi dalam Pendidikan Pancasila dengan demikian sangat tinggi.

Perbedaan penataran P4 dengan MKDU Pendidikan Pancasila amat besar dalam hal waktu penyelenggaraan. Penataran P4 pola 100 jam dilakukan dalam 2 minggu dan setiap
hari berlangsung dari pagi jam 07.00 sampai sore jam 17.00.
Sedangkan perkuliahan Pendidikan Pancasila dilakukan dalam waktu yang longgar, yaitu setiap minggu 100 menit
dalam satu semester.

b. Penataran P4 bagi Mahasiswa sebagai Pendidikan Moral

Secara yuridis formal ditekankan bahwa pendidikan Pancasila merupakan pendidikan moral (Penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional). Sedangkan penataran P4 merupakan bagian dari keseluruhan pendidikan Pancasila. GBHN tahun 1988 menyatakan bahwa pendidikan P4, PMP, PSPB, serta unsur-unsur yang dapat meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai kejuangan termasuk dalam pendidikan Pancasila. Jadi jelas bahwa penataran P4 bagi mahasiswa dapat dianggap sebagai pendidikan moral.

Apakah secara konseptual penataran P4 dapat dianggap sebagai pendidikan moral? Untuk menjawab pertanyaan ini perlu dilihat dua peranan pokok Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertama, peranan Pancasila sebagai pandangan hidup memungkinkan Pancasila menjadi pedoman tingkah laku bagi setiap warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari (Darji Darmodiharjo, 1983:24). Peranan Pancasila sebagai pandangan hidup lebih menonjol terlihat pada P4 yang memang berisi hal-hal yang beraspek moral (Tim Pendidikan Moral Pancasila, 1983:10). Kedua, peranan Pancasila sebagai dasar negara memungkinkan Pancasila menjadi pedoman untuk mengatur penyelenggaraan negara (Darji Darmodiharjo, 1983:28). Peranan kedua ini lebih tergambar pada UUD 1945 dan GBHN.

Notonagoro (1982:57-58) menganggap dua peranan Pancasila tersebut dalam pelaksanaannya berintikan moral, yaitu: subjektivikasi yang objektif yang berarti pedoman bagi moral negara, dan subjektivikasi yang subjektif yang berarti pedoman moral kenegaraan bagi manusia Indonesia. Jadi bila ditinjau dari segi materi penataran P4 yang berisi P4, UUD 1945, dan GBHN, maka penataran P4 dapat dianggap sebagai pendidikan moral.

Bila tujuan penataran P4 adalah agar peserta mampu memahami Pancasila secara benar, menghayatinya, serta
pada akhirnya diharapkan mengamalkannya, maka pengamalan
itu bersifat objektif maupun subjektif.

William F. Connell (David Purpel, 1976:31) berpendapat bahwa sulit untuk memisahkan antara pendidikan moral dengan pendidikan politik. Karena ia menganggap pendidikan moral berhubungan dengan pengembangan sifatsifat watak dan bentuk-bentuk perilaku yang terpilih, dan yang lebih disukai oleh guru. Basis untuk pemilihan sifat watak dan perilaku itu adalah politik.

Pancasila sebagai ideologi negara yang bersifat terbuka memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk bertukar pikiran mencari berbagai alternatif dalam menyambut masa depan (Presiden Soeharto, Kompas, 29 Juni 1990). Maka dari itu Sarwo Edhie Wibowo menegaskan sebagai berikut:

bebasan mengeluarkan pendapat, untuk menyampaikan saran-saran atau pun konsepsi dat persepsi mengenai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasar pada Pancasila dan UUD 1945. Sebab yang berdasar pada Pancasila dan UUD 1945. Sebab yang berdasar pada kegiatan pendidikan politik sepenataran P4 adalah kegiatan pendidikan politik sepenataran P4 adalah kegiatan pendidikan politik sepenataran pendidikan politik sepenataran pendidikan politik sepenataran pendidikan politik sepenataran seluruk rakyat Indonesia akan hak-hak dan kesadaran seluruk rakyat Indonesia akan hak-hak dan kesadaran seluruk rakyat Indonesia yang kuwajibannya sebagai warga negara Indonesia yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945 (Mimbar BP7, No.19 tah-1 1986:7).

Jadi, wala pun penataran P4 terkait dengan pendidikan politik tetapi penataran P4 memberikan keleluasaan kepad peserta untuk berpikir, berdialog mengemukakan pendapat, memilih serta menilai perkembangan yang terjadi di masyarakat terutama yang berkenaan dengan upaya-upaya pembangunan. Soedjatmoko (1988:269) menyatakan bahwa usaha pembangunan, baik dalam tujuannya maupun dalam cara-cara pelaksanaannya, tidak dapat dilepaskan dari sistem nilai dan moralitas pokok suatu bangsa. Maka itu, Pancasila bukan saja sebagai falsafah negara, tetapi juga sebagai batu ujian kongkrit terhadap langkah-langkah pertumbuhan masyarakat.

Penggunaan prinsip-prinsip moral-legal untuk memecahkan masalah masyarakat dalam pendidikan moral juga dilakukan oleh James P. Shaver. Ia beranggapan bahwa pendidikan moral mesti ditempatkan dalam konteks sosial. Karena itu falsafah bangsa merupakan alasan yang fundamental dalam memecahkan masalah-masalah moral dalam masyarakat majemuk secara demokratis (James P.Shaver, 1982:107).

bulat tak terpisahkan. Kita dapat memisah-misahkannya secara teoretis, tetapi pada kenyataannya eksistensi manusia itu bulat utuh, seimbang, harmonis, dan dinamis.

Dari uraian singkat di atas dapat disimpulkan bahwa ada empat sifat manusia yang utuh. Pertama, maausia yang utuh adalah manusia yang bertanggung-jawab kepada Tuhan penciptanya; bertanggung-jawab terhadap sesama manusia, baik secara kultural, sosial, maupun moral; bertanggung-jawab terhadap bangsa dan negaranya: bertanggung-jawab terhadap alam semesta sebagai sesama ciptaan Tuhan; dan bertanggung-jawab terhadap dirinya sendiri secara jasmaniah dan rokhaniah. Kedua, manusia yang utuh adalah manusia yang secara seimbang menjalankan berbagai tanggung-jawab yang dipikulnya tersebut. Ketiga, manusia yang utuh adalah manusia yang memiliki otonomi sebagai makhluk Tuhan, yang bebas menentukan pilihan hidupnya. Keempat, manusia yang utuh adalah manusia yang mengakui adanya kebenaran yang mutlak, di samping kebenaran relatif yang diciptakan manusia itu sendiri sebagai konsekuensi otonomi yang dimilikinya.

Sifat-sifat manusia yang utuh di atas dapat dija-dikan tolok ukur bagi pengembangan program pendidikan umum di Indonesia. Termasuk secara khusus, dapat menjadi tolok ukur bagi penilaian proses belajar-mengajar penataran P4.

Jelaslah bahwa upaya mengembangkan warga negara yang bertanggung-jawab merupakan salah satu tujuan dari pendidikan umum. Penataran P4 barangkali secara khusus memusatkan pada usaha mengembangkan tanggung-jawab sebagai warga negara yang baik, secara moral maupun secara politik. Usaha ini tetap dikenai kriteria-kriteria keseimbangan, otonomi, dan pengakuan terhadap kebenaran yang mutlak dan kebenaran relatif.

Penerapan tolok ukur keseimbangan dalam penataran P4 adalah apakah penataran P4 mampu secara seimbang mengaktifkan akal, rasa, dan karsa petatar? Kepribadian yang utuh adalah kepribadian yang konsisten antara yang dipikirkan, dirasakan, dan diperbuat. Proses belajar-mengajar penataran P4 dapat dinilai dari keterlibatan pikiran, perasaan, dan tindakan petatar secara total.

Tolok ukur otonomi dalam menilai proses belajar mengajar penataran P4 tersimpul dalam pertanyaan: apakah dalam penataran P4 terdapat penghormatan terhadap kebebasan petatar untuk berpikir, merasakan, dan berbuat? Kriteria otonomi ini menyiratkan maksud bahwa petatar adalah subjek, bukan objek yang hendak dibentuk.

Proses belajar-mengajar penataran P4 juga harus diukur dari pengakuan terhadap kebenaran mutlak (nilai objektif Pancasila) dan kebenaran relatif (penerapan nilai Pancasila dalam masyarakat, pribadi, bangsa dan negara).

4. Pendekatan-pendekatan dalam Pendidikan Moral

Pendekatan dalam kaitan ini berarti prinsipprinsip yang dipegang oleh guru dalam menentukan strategi belajar-mengajar yang diyakininya efektif untuk mencapai tujuan pendidikan moral. Richard H. Hersh. John P. Miller, dan Glen D. Fielding (1980:2) mengemukakan bahwa adanya berbagai model dalam pendidikan moral pada dasarnya menunjuk pada perbedaan penekanan dalam proses mempedulikan (caring), mempertimbangkan (judging) dan mengambil tindakan (acting). Mereka menganggap moralitas tergantung pada komposisi antara kepedulian manusia, pemikiran yang objektif, dan tindakan-tindakan yang diambilnya. Kepedulian pada orang lain merupakan aspek afeksi dari mora<mark>litas.</mark> Sed<mark>angk</mark>an pertimbangan merupakan aspek kognisi. Dan aspek tindakan moral amat tergantung pada kualitas kepedulian (afeksi) dan pertimbangan (kognisi) yang mengarahkannya (R.H.Hersh, et al., 1980:5).

Jadi paling tidak ada tiga pendekatan utama dalam pendidikan moral, yaitu: pendekatan kognitif, pendekatan afektif, dan pendekatan tindakan. Masing-masing pendekatan berbeda dalam penekanan prinsip kognisi, afeksi, atau tindakan dalam moralitas.

a. Pendekatan kognitif

Pendekatan kognitif berpegang pada prinsip bahwa moralitas seseorang lebih ditentukan oleh kemampuannya untuk memahami, menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan menilai nikai-nilai moral terutama bila dihadapkan pada situasi moral tertentu. Prinsip ini sejalan dengan pendapat Aristoteles yang memandang moralitas sebagai soal pengetahuan (S.Nasution, 1988:37).

Secara tradisional penggunaan pendekatan kognitif dalam pendidikan moral tercermin pada pemberian nasehat. Tujuan pemberian nasehat adalah agar generasi muda memahami nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakatnya. Sehingga pengajaran moral diberikan dalam bentuk prinsipprinsip abstrak dan anak-anak dibiarkan pasif (Norman J. Bull, 1969:134).

Pendekatan kognitif yang lebih modern mengaktifkan proses berpikir yang lebih tinggi. Shaver (1982:109) lebih menekankan pada penerapan nilai-nilai moral bangsa untuk memecahkan masalah moral di masyarakat. Jerrol R. Commbs (Cheppy H.C.,1990:7) lebih mengutamakan analisis data secara sistematis, berkaitan dengan kasus moral tertentu, untuk sampai pada prinsip moral. Dan Lawrence Kohlberg (David Purpel, 1976:181) lebih menekankan pada pertimbangan moral dan perkembangannya.

Menurut J. Shaver, pendidikan moral bertujuan agar para siswa dapat menilai isu sosial dari segi masyarakat demokratis dan pluralistik. Guru memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan nilai-nilai moral demokrasi pada anak didik tetapi harus melalui cara-cara yang rasio-nal (R.H. Hersh, 1980:36). Strategi belajar-mengajar yang sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut adalah: menghadapkan siswa pada situasi moral, mengidentifikasi dan mengklarifikasi nilai-nilainya, memberi label pada nilai-nilai tersebut sesuai dengan nilai-nilai dasar masyarakat, mempertimbangkan konsekuensi dan konflik nilai, dan mengambil keputusan (J.Shaver, 1982: 196-113).

Tujuan pendidikan moral menurut J.R.Commbs adalah mencapai prinsip-prinsip dalam penilaian melalui
pengumpulan dan analisis data secara sistematis, rasional dan ilmiah (S.Nasution, 1989:175). Ia membedakan
kriteria nilai dan prinsip nilai. Kriteria nilai adalah
alat untuk menilai informasi atau fakta dan memiliki valensi positif atau negatif. Prinsip nilai adalah prinsip yang dicapai pada akhir analisis masalah secara keseluruhan sebagai kesimpulan yang diambil berdasarkan
sejumlah kriteria nilai. Karena itu, strategi yang dipakai Commbs dalam mencapai tujuan pendidikan moral adalah
menghadapkan siswa pada situasi konflik moral, mengidentifikasi dan menjelaskan pertanyaan nilai, mengumpulkan
dan menyusun informasi atau fakta berdasarkan valensinya,
menilai kebenaran fakta tersebut, menjelaskan fakta-fakta

yang relevan, membuat keputusan nilai sementara, dan mengujinya sebelum mencapai keputusan akhir yang berupa prinsip nilai (R.H. Hersh, 1980:103).

Tujuan pendidikan moral menurut L. Kohlberg adalah agar siswa meningkat dalam perkembangan moralnya. Piaget dan Kohlberg telah membuktikan bahwa perkembangan moral merupakan proses reorganisasi kognitif yang membentuk tahap-tahap yang bersifat invarian dan hirarkis. Perkembangan moral tersebut dimungkinkan oleh perubahan pertimbangan moral yang lebih berkualitas. Pertimbangan moral (moral judgment) merupakan proses kognitif untuk memikirkan nilai-nilai dan meletakkan nilai-nilai itu dalam hirarki logis. Proses logis dalam pertimbangan moral meliputi: adanya disequilibrium, adanya usaha untuk memulihkan equilibrium, mencoba mengasimilasi, dan berikutnya mengakomodasi cara berpikirnya (J.Reimer, 1983:46). Peranan disequilibrium kognitif ini penting untuk menantang seseorang untuk berpikir, memecahkan konflik moral, dan bergerak ke tahap yang lebih tinggi. Kematangan moral memperbesar kemampuan untuk memecahkan konflik moral.

Strategi belajar mengajar untuk mencapai tujuan perkembangan moral dimulai dengan menghadapkan siswa pada situasi dilema moral, menyuruh siswa menentukan pendiriannya, menyelidiki alasan-alasan di belakang pendirian tersebut, dan memikirkan kembali pendirian masing-masing (S.Nasution, 1988:20).

b. Pendekatan afektif

Pendekatan afektif berpegang pada prinsip bahwa moralitas seseorang lebih ditentukan oleh motivasi untuk berbuat baik terhadap sesama manusia. Pendekatan afektif yang tradisional seringkali disejajarkan dengan proses indoktrinasi karena samasekali tidak memberikan kesempatan pada siswa merefleksi nilai yang dianggap baik itu. Seringkali indoktrinasi dilakukan dengan cara anjuran , propaganda , pembiasaan, teladan, dan sanksi-sanksi (The Encyclopedia of Education, 1971: 396).

Pendekatan afektif yang lebih modern lebih banyak mengajak peserta didik untuk berdialog memperjelas dan menghargai nilai-nilai yang dimilikinya, atau mempeduli-kan perasaan orang lain. Louis E.Raths, Merrill Harmin, dan Sidney B.Simon (1978:27-28) adalah tokoh-tokoh pendekatan afektif yang menghindari indoktrinasi. Mereka lebih mengutamakan pemilihan nilai secara bebas dari berbagai alternatif dengan mempertimbangkan konsekuensinya, menghargai pilihannya itu dan menyatakan di depan umum, serta melaksanakan berulang-ulang. Aspek-aspek yang dikembangkan Raths dan kawan-kawannya tersebut tergolong ranah afektif. Sebab seperti yang dikembangkan Krathwohl, Bloom, dan Masia (1974:95), kesediaan untuk menerima, merespons, menghargai, mengorganisasikan, dan mewatakkan nilai-nilai merupakan ranah afektif.

Strategi yang dikembangkan Raths adalah diskusi dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mendorong pelajar memilih nilai-nilainya secara bebas, menghargainya dan berbuat secara konsisten.

Pendekatan yang menekankan pada prinsip penghargaan pada orang lain dikembangkan oleh McPhail. Ia percaya bahwa hidup untuk kepentingan orang lain ialah pengalaman yang membebaskan dari egoisme, dan hanya dengan "tepo seliro" kepada orang lain kita dapat mewujudkan diri kita sepenuhnya (S.Nasution, 1989:161). Strategi yang dirancang McPhail sesuai dengan prinsip ini adalah: menghadapkan siswa kepada situasi yang mengandung kepedulian, siswa menganalisis situasi itu, menuliskan responsnya, menganalisis respons tersebut dan memerankannya (sosiodrama), mendorong siswa menjajaki konsekuensi tiap tindakan, merencanakan penelitian-mengumpulkan informasi tambahan tentang masalah itu, dan membolehkan siswa membuat pilihan sendiri mengenai sikap yang dirasakan paling sesuai baginya.

Freud menganggap watak seseorang banyak dipengaruhi pengalaman emosional waktu kecil. Bahkan ia berpendapat bahwa perkembangan moral akan mengalami fiksasi
pada usia lima-enam tahun (S.Nasution, 1988:23). Sehingga realitas moral keluarga berpengaruh pada setiap
orang. Apakah ia merasa aman, tenteram, diterima, dicin-

tai sewaktu kecil oleh anggota keluarganya akan berpenngaruh terhadap sosok kepribadiannya di masa depan.

Bila demikian maka strategi pendidikan moral harus
lebih mengarah pada lingkup pendidikan keluarga. Dan guru harus lebih banyak memperhitungkan latar belakang keluarga siswanya.

c. Pendekatan tindakan

Pendekatan tindakan (<u>action</u>) berpegang pada prinsip bahwa setiap orang adalah agen moral. Sebagai agen moral ia harus sanggup mempertimbangkan apa yang harus dilakukan dalam situasi konflik antara kepentingannya sendiri dengan kepentingan orang lain atau antara hak-hak kelompok. Manusia memiliki kecenderungan untuk menggunakan pengaruhnya terhadap lingkungan, karena manusia memiliki insting dasar yang merupakan energi ego bebas yang oleh Robert White dinamakan "<u>effectance</u>". Perasaan mampu untuk berbuat, bertindak, mempengaruhi lingkungan disebut dengan "<u>a feeling of efficacy</u>" (Fred M.Newmann, 1975:33).

Tujuan pendidikan moral menurut pendekatan ini adalah agar peserta didik memiliki kompetensi lingkungan atau mampu menggunakan pengaruhnya terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat (Fred M.Newmann, 1975:41).

Strategi belajar-mengajar yang digunakan Fred M.Newmann untuk mencapai tujuan tersebut adalah menghadapkan siswa pada masalah nyata yang dihadapi masyarakatnya, mengajak siswa untuk mengadakan pertimbangan moral terhadap masalah tersebut, mengadakan penelitian kritis untuk memperoleh alternatif tindakan sosial, memilih salah satu alternatif untuk dilaksanakan, merencanakan strategi tindakan sosial, melaksanakan strategi tersebut, dan memecahkan konflik-konflik yang terjadi selama pelaksanaan strategi (S.Nasution, 1989:180).

Walaupun Newmann mengutamakan aspek tindakan tetapi ia masih mengaitkannya dengan proses penalaran (pertimbangan moral) dan perasaan mampu untuk berbuat sesuatu secara sukses (efficacy). Lain halnya dengan ahli-ahli psikologi behavioristik yang mengutamakan rangkaian stimulus-respons untuk memperoleh tindakan moral yang diharapkan. Skinner menganggap tindakan moral terbentuk berkat "operant conditioning", yaitu melalui hukuman bila berbuat salah, dan hadiah bila berbuat benar (S.Nasution, 1988:24).

Terdapat lima teknik yang dapat digunakan oleh guru untuk merubah perilaku siswa, yaitu: memberi hadiah, menangguhkan hadiah, menghukum, mengancam untuk mendapat-kan hukuman, dan mengabaikannya (Charles H.Madsen, et al., 1981:57).

5. Temuan-temuan Penelitian Sebelumnya

Endang Sumantri (1988:4) meneliti tentang "Program Penataran P4 Bagi Mahasiswa Baru: suatu Usaha Pembinaan Politik dan Pembinaan Akademik Generasi Muda untuk Kelangsungan Pembangunan Nasional". Lima masalah pokok penelitian ini adalah: apakah kemampuan kognitif mahasiswa terhadap penguasaan bahan penataran mempunyai peningkatan yang berarti dibandingkan antara hasil test awal dengan hasil test akhir? Apakah kemampuan afektif mahasiswa terhadap pengertian dan manfaat materi penataran dapat memupuk rasa kebangsaan dan tanggung jawab bernegara? Adakah dari pengetahuan dan pengertian mahasiswa yang didapat selama penataran dapat berkembang ke arah rasa tanggung jawab generasi muda terhadap kelangsungan pembangunan nasional? Apakah perbedaan-perbedaan persepsi dan pemahaman baik dari segi kognitif maupun afektif mahasiswa di antara yang berbeda latar belakang keilmuan? Dan apakah ada pendapat, ide dan saran-saran mahasiswa terhadap desain, strategi dan pelaksanaan penataran P4 atas dasar pengalaman mereka?

Endang Sumantri menemukan bahwa program penataran P4 menunjukkan pengaruh yang berarti terhadap kemampuan kognitif mahasiswa. Program penataran P4 mampu memacu pergeseran naik rasa keterikatan, cita-cita dan pengertian mahasiswa tentang kedudukannya sebagai warga negara.

